

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP
PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIAL PERUSAHAAN DALAM *ANNUAL
REPORT***

**(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG
TERCATAT DI BEI TAHUN 2008-2009)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RIRIN DWI ANGGRAINI

NIM. C2C007113

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ririn Dwi Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh Kepemilikan Institusional dan
Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dalam
Annual Report (Studi Empiris pada Perusahaan
Non Keuangan yang Tercatat di BEI tahun
2008-2009)**
Dosen Pembimbing : Dr.Drs.H. Rahardja,MSi,Akt

Semarang, 1 Februari 2011

Dosen Pembimbing

(Dr.Drs.H. Rahardja,MSi,Akt)

NIP: 194911144 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ririn Dwi Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh Kepemilikan Institusional dan
Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dalam
Annual Report (Studi Empiris pada Perusahaan
Non Keuangan yang Tercatat di BEI tahun
2008-2009)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Maret 2011

Tim Penguji :

1. Dr.Drs.H. Rahardja, MSi, Akt (.....)
2. Drs. Daljono, MSi, Akt (.....)
3. Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ririn Dwi Anggraini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam *Annual Report* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Tercatat di BEI Tahun 2008-2009)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

(Ririn Dwi Anggraini)

NIM. C2C007113

ABSTRACT

This study is about corporate social responsibility (CSR) study. Focus of this study is to analyze CSR disclosure and reporting in annual report of non financial companies .This study aimed to investigate the influence of institutional ownership, and foreign ownership to disclosure of corporate social responsibility in annual report.

Collecting data using a purposive sampling method for non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2008 until 2009. A total of 48 non-financial companies used as a sample. In this research use size of companies, return on asset and type of companies as variable control. The method of analysis of this study used multiple regression.

The results of this study indicate that the variable that affect disclosure of corporate social responsibility is size of companies and type of companies where are the control variable. While variables that did not affect disclosure of corporate social responsibility are institutional ownership, foreign ownership and return on asset.

Key Words: Disclosure of corporate social responsibility, Institutional ownership, and Foreign ownership.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Fokus dari penelitian ini adalah analisis terhadap pengungkapan dan pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan non keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report*.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2009. Sebanyak 48 perusahaan non keuangan digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan *size*, ROA dan *type* sebagai variabel kontrol. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah ukuran perusahaan (*size*) dan tipe perusahaan (*type*) yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ROA.

Kata Kunci: Pengungkapan Pertanggungjawaban sosial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam *Annual Report* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Tercatat di BEI Tahun 2008-2009)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Mohamad Nasir, MSi, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan dedikasi kepada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs.H. Rahardja, MSi, Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Marsono, SE, M.Adv. Acc. Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Kambali dan Ibu Samini yang memulai segala hal dari nol sampai Penulis seperti sekarang ini serta adikku, Aris Tri Apriyanto yang selalu dengan sabar mendampingi, memberikan semangat, dan doa kepada Penulis. Hasil usaha kalian akan terbayar di masa depan. Untuk Agus Prasetyo (Alm), kakak ku tersayang, kini adik mu bisa kau banggakan dan tersenyumlah disana. Aku akan menggantikan posisimu yang sempat terbengkalai beberapa waktu.
7. Mohammad Fajrul Falah (Pan Pan) yang selalu dengan sabar mendampingi, memberikan semangat serta meluangkan waktu dan pikiran buat Penulis.
8. Teman-teman genk LeGi, Fika, Rini, Mehyung, Tika, mbk Maya, Prima, Jere, Adis. Terima kasih telah menjadi sahabat ku dan selalu memberikan dukungan kepada Penulis. Don't forget me Guys!!
9. Aliansi Kudus yang selalu kompak dalam segala hal. Terima kasih Mas Bayu Nugroho, Andrian Budi dan Ika Aryani buat input dan output kalian. Cia You Kudus!!!
10. Indah Mustika D, Irma, Cha cha, Yeli, si Syur, si Cow, bang Jak, Koh Sam, Bebek, neng gelis Amel, dan seluruh anak Akuntansi 2007 yang selalu menginspirasi Penulis. Undanganny ya klo kalian pada nikah!!!!

11. Anak kosan Pleburan Selatan No.15, Mbak Otis, Mbak Dewi, Widhi, Pwety, Kim Jene, Mbak Puri, Mbak Tika dan Otis yang selalu mendukung Penulis.
12. Mas Aziz di pojok BEI Fakultas Ekonomi Undip.
13. Mas Argo, terima kasih atas input-inputnya. Kita dipertemukan oleh “skripsweet”.
14. Saudari ku Wulan Wiyat Wuri. Terima kasih atas bantuan jurnalnya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 1 Februari 2011

Penulis

Ririn Dwi Anggraini

NIM. C2C007113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

In ALLAH SWT I am Trust.

Setiap kali melangkah, ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirahim.

Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, kita harus melakukannya (**Johann Wolfgang von Goethe**).

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna (**Einstein**).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta
2. Kakak (Alm) dan Adikku Tersayang
3. Kekasihku
4. Sahabat dan Teman-temanku
5. Almamaterku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Stakeholder.....	15
2.1.2 Teori Legitimasi	17

2.1.3 Pengertian (CSR) Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan.....	19
2.1.4 Pengungkapan Sosial Sebagai Tanggung Jawab Perusahaan	20
2.1.5 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan	22
2.1.6 Struktur Kepemilikan dengan Pengungkapan CSR	25
2.1.6.1 Struktur Kepemilikan Institusional	26
2.1.6.2 struktur Kepemilikan Asing	28
2.1.7 Variabel Kontrol.....	31
2.1.7.1 ROA	31
2.1.7.2 <i>Firm Size</i>	32
2.1.7.3 <i>Firm Industry</i>	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Penelitian Teoritis.....	37
2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
3.1.1 Variabel Penelitian.....	44
3.1.2 Definisi Operasional.....	45
3.1.2.1 Variabel Dependen.....	45
3.1.2.2 Variabel Independen	46
3.1.2.3 Variabel Kontrol.....	47
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	53
3.3 Jenis dan Sumber Data	54
3.4 Metode Pengumpulan Data	55

3.5 Metode Analisis Data	55
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	55
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	55
3.5.2.1 Uji Normalitas	56
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	56
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	57
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	58
3.5.3 Uji Hipotesis	59
3.5.3.1 Analisis Regresi	59
3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
3.5.3.3 Uji Pengaruh Simultan (F test)	61
3.5.3.4 Uji Parsial (t test)	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Deskriptif Objek Penelitian	64
4.1.1 Deskripsi Umum Penelitian	64
4.1.2 Deskripsi Sampel Penelitian	65
4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	68
4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	68
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	71
4.2.2.1 Uji Normalitas	71
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	73
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	74
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	78

4.2.3 Uji Hipotesis	78
4.2.3.1 Analisis Regresi Berganda	77
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	80
4.2.3.3 Uji Simultan (F Test)	81
4.2.3.4 Uji Parsial (t test)	82
4.3 Interpretasi Hasil	84
4.3.1 Pengaruh IO terhadap CSDI.....	84
4.3.2 Pengaruh FO terhadap CSDI.....	86
4.3.3 Variabel Kontrol.....	90
4.3.3.1 Pengaruh ROA terhadap CSDI.....	90
4.3.3.2 Pengaruh <i>Size</i> terhadap CSDI.....	90
4.3.3.3 Pengaruh <i>Type</i> terhadap CSDI.....	91
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Keterbatasan Penelitian	96
5.3 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Definisi Operasional	46
Tabel 4.1	Perusahaan Non Keuangan di BEI Tahun 2008-2009	64
Tabel 4.2	Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria	66
Tabel 4.3	Daftar Sampel Perusahaan	66
Tabel 4.4	Distribusi Sampel berdasarkan jenis Usaha	67
Tabel 4.5	Deskriptif Statistik Variabel Penelitian	68
Tabel 4.6	Distribusi <i>Type</i> Perusahaan	70
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov (KS)	73
Tabel 4.8	Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.9	Uji Park	76
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi.....	77
Tabel 4.11	Uji Regresi Berganda.....	78
Tabel 4.12	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	80
Tabel 4.13	Uji Simultan (F Test)	82
Tabel 4.14	Uji Parsial (t Test).....	83
Tabel 4.15	Ringkasan Hasil Penelitian	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Antar Variabel Penelitian	39
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	71
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot.....	72
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	75
Gambar 4.4 Uji Autokorelasi	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar CSDI Berdasarkan GRI	102
Lampiran B Daftar Sampel Perusahaan	107
Lampiran C Daftar Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Non Keuangan	108
Lampiran D Tabulasi Data Penelitian	110
Lampiran E Statistik Deskriptif	113
Lampiran F Uji Asumsi Klasik	114
Lampiran G Uji Regresi	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan gagasan yang menjadikan tanggung jawab perusahaan tidak hanya berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan yang diprosikan dengan ukuran kinerja keuangan saja. Tapi, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yang juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri,2008). *Global Compact Initiative* (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (*profit, people, planet*) yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga menyejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Nugroho,2007 dalam Dahlia dan Siregar,2008).

Sekarang kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan akan memperoleh

legitimasi sosial (Oliver,1991; Haniffa dan Coke,2005; Ani,2007; Djakman dan Machmud,2008). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kiroyan (2006), Sayekti dan Wondabio (2007) dalam Djakman dan Machmud (2008) menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait lingkungan diantaranya, UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 6 ayat 2 UU No.23 tahun 1997 ini yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pengelolaan lingkungan hidup".

Untuk melengkapi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah melalui Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan melalui No.Kep-BU/BL/2006 yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Desember 2006 juga mewajibkan laporan keuangan tahunan perusahaan sekurang-kurangnya memuat uraian tentang aktivitas dan biaya yang dikeluarkan terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan PSAK No.1 tahun 2004 (revisi 1998)

paragraf sembilan secara eksplisit telah menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial dan lingkungan perusahaan. Walaupun demikian, item-item pengungkapan dan bagaimana pengungkapannya belum diatur secara terperinci.

Kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan juga diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut menjadi landasan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan *mandatory disclosure* untuk setiap perusahaan di Indonesia bukan lagi *voluntary disclosure*.

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial diatur dalam UU No.40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007 yang menyatakan bahwa laporan tahunan juga memuat laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan merupakan bentuk dari transparansi kinerja perusahaan kepada publik sesuai dengan prinsip *good corporate government* (Beattie, et al, 2002 dalam Fauzi, 2007). Menurut Darwin (2006) dalam Hermawati (2009) kini cukup banyak perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosialnya melalui laporan tahunan atau laporan terpisah yang disebut *sustainability reporting* dan media lainnya seperti *website*. Hal ini diakibatkan dari tekanan global terhadap dunia usaha yang semakin meningkat dan menuntut akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat atas kinerja dan tanggung jawab sosialnya.

Tekanan global tersebut juga mempengaruhi pasar modal sehingga muncul bentuk pelaksanaan CSR di bidang pasar modal seperti penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki *Socially Responsible Investment* (SRI) Index dan *Financial Times Stock Exchange* (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001. Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange. Konsekuensi dari adanya indeks-indeks tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam indeks (Daniri,2008).

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan

menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan.

Pertumbuhan yang dominan dari kepemilikan institusional di pasar modal mencerminkan konsentrasi dan kenaikan kekayaan oleh investor institusional (Brancato dan Gaughan,1991 dalam Fauzi, Mahoney, dan Rahman,2007). Sehingga keputusan investor institusional dalam pasar modal berdampak pada nilai saham perusahaan. Turban dan Greening (1997) menyatakan bahwa investor institusional melihat keuntungan jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam *corporate social performance*.

Spicer (1978), Mahoney dan Robert (2007) menyatakan bahwa investor institusional mempertimbangkan *corporate social performance* yang rendah dari perusahaan merupakan investasi yang berisiko. Risiko itu berasal dari biaya sanksi akibat mengabaikan peraturan yang ada (*mandatory disclosure*). Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan kegiatan sosial yang nantinya diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga *corporate social activities* merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan.

Bentuk struktur kepemilikan yang lain adalah kepemilikan asing. Dalam dua dekade ini, kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi. Pertumbuhan yang pesat dari kepemilikan asing ini akan membuat perusahaan asing mengalami tekanan dari masyarakat sekitar. Jika perusahaan asing tidak

mampu memberikan manfaat bagi sosial dan lingkungannya, maka akan memperburuk reputasi perusahaan asing di masyarakat (Fauzi,2008).

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Negara-negara seperti Eropa dan *United State* merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Djakman dan Machmud, 2008). Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006; Djakman dan Machmud, 2008).

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995; Barkemeyer, 2007; Djakman dan Machmud, 2008). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Terdapat hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan asing terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Beberapa penelitian tersebut

antara lain diteliti oleh Coffey dan Fryxell (1991) meneliti daya tanggap perusahaan terhadap isu sosial yang diproksikan dengan jumlah wanita yang masuk jajaran direktur, tanggung jawab sosial yang diproksikan dengan kegiatan sosial yang bersifat memberi bantuan, dan manajemen isu sosial pengaruhnya terhadap kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut, daya tanggap perusahaan berpengaruh positif terhadap kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial tidak signifikan terhadap kepemilikan institusional, dan manajemen isu sosial berpengaruh negative terhadap kepemilikan institusional.

Waddock dan Graves (1994) meneliti kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang mempunyai saham di suatu perusahaan dan juga diproksikan dengan persentase saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan terhadap *corporate social performance*. Hasil penelitian tersebut, kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang mempunyai saham di suatu perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap *corporate social performance*. Sedangkan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan persentase saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *corporate social performance*.

Mahoney dan Robert (2002) meneliti hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan, serta kinerja sosial dengan kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut, terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan. Sama halnya dengan, hubungan antara

kinerja sosial dengan kepemilikan institusional yang menunjukkan hasil yang signifikan.

Djakman dan Machmud (2008) meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan publik yang listing di BEI tahun 2006. Hasil penelitian tersebut, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, serta kategori perusahaan BUMN dan non BUMN tidak berpengaruh signifikan terhadap *CSR disclosure*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *CSR disclosure*.

Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) meneliti kepemilikan institusional terhadap *corporate social performance* di perusahaan Indonesia. Hasil penelitian tersebut, tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan *corporate social performance*. Variabel kontrol yang ditunjukkan tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social performance*. Sedangkan variabel kontrol yang ditunjukkan oleh ROA, ROE, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social performance*.

Tanimoto dan Suzuki (2005) melihat luas adopsi GRI dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang. Hasil penelitian tersebut, pengadopsian GRI oleh perusahaan publik di Jepang dipengaruhi secara signifikan oleh isu lingkungan, kepemilikan asing, penjualan ke luar negeri dan ukuran perusahaan. Sedangkan kepemilikan terbesar oleh perusahaan domestik, partisipasi dari group bisnis besar, dan rasio laba bersih terhadap penjualan

berpengaruh tidak signifikan terhadap pengadopsian GRI oleh perusahaan publik di Jepang.

Penelitian mengenai kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan masih sedikit dilakukan di Indonesia dan masih ditemukannya beberapa hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Namun demikian, secara teoritis semakin tinggi kepemilikan institusional dan kepemilikan asing menjadikan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan. Banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan meningkat tiap tahun. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya program CSR sebagai salah satu bagian dari strategi perusahaan dan mendapatkan legitimasi oleh masyarakat (Permanasari, 2009). Hal ini mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut. Penelitian ini mencoba menguji kembali variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam *annual report* setelah dikeluarkannya UU No.40 pasal 74 tahun 2007.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hasan Fauzi, Lois Mahoney dan Azhar Abdul Rahman (2007); Novita Machmud dan Chaerul D Djakman (2008). Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh

perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian sebelumnya, masih menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, dapat dilihat dari variabel kontrolnya yang berupa ROA, *firm size* dan *firm industry*. Pada penelitian Djakman dan Machmud (2007), variabel kontrol yang digunakan adalah *size*, *type* dan kategori BUMN dan non BUMN. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan, tahun pengujian, alat statistik dan kondisi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan *pooled data* yaitu menggunakan data dari berbagai perusahaan selama dua tahun yaitu 2008 dan 2009. Alasan penggunaan tahun tersebut karena penerapan UU No.40 Tahun 2007, sehingga pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report* perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia menjadi *mandatory* atau wajib bagi setiap perusahaan.

Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *return on asset*, tipe industri, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam *Annual Report***

(Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Tercatat di BEI Tahun 2008-2009)’’.

1.2 Perumusan Masalah

Masih sedikitnya penelitian di Indonesia mengenai kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dengan variabel kontrol ROA, tipe industri dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report*, dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, masih menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hal tersebut, mendorong untuk dilakukan pengujian kembali terhadap struktur kepemilikan perusahaan utamanya kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dengan variabel kontrol ROA, tipe industri, dan ukuran perusahaan. Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *return on asset*, tipe industri, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report* pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009?

2. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report* pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis struktur kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report* pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis struktur kepemilikan asing berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report* pada perusahaan non keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial:

1. Bagi akademisi, memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melihat pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dikarenakan kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat.

2. Bagi perusahaan, menjadikan perusahaan lebih *aware* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial di masa mendatang, seperti halnya pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh negara-negara barat sebagai salah satu informasi yang penting.
3. Bagi *shareholder* maupun seluruh *stakeholder*, bahwa struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan karena kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat dan untuk melihat keuntungan jangka panjang yang akan didapat oleh perusahaan yakni *image* dan reputasi perusahaan melalui nilai saham perusahaan.
4. Bagi pemerintah, untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang telah dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika untuk masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Selain itu, di dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir dari bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka, berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report*. Landasan teori dan penelitian terdahulu selanjutnya digunakan untuk membentuk kerangka teoritis.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan tentang hasil penelitian serta analisis data yang telah diolah.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Menurut Gray, Kouhy dan Adam (1994, p.53) dalam Chariri dan Ghozali (2007) mengatakan bahwa

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerfull stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *manage stakeholder*-nya (Gray *et al*, 1997 dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Ullman (1985) berpendapat bahwa *power stakeholder* berhubungan dengan “postur strategis” yang diadopsi perusahaan. *Strategic posture* menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. Oleh karena itu, *stakeholder*

theory pada dasarnya melihat dunia luar dari perspektif manajemen (Gray, Kouhy dan Lavers, 1995b).

Cara-cara yang dilakukan oleh manajemen tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman, 1985). Menurutnya ada dua postur strategis yang akan diadopsi perusahaan. *Active posture* merupakan strategi yang berusaha mempengaruhi hubungan organisasi dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting. Hal ini menunjukkan bahwa *active posture* tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Perhatian yang besar terhadap *stakeholder* akan mengakibatkan tingginya tingkat pengungkapan informasi sosial dan tingginya kinerja sosial perusahaan.

Strategi yang kedua adalah *passive posture*. Strategi yang cenderung tidak terus menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Kurangnya perhatian terhadap *stakeholder* (dalam pendekatan *passive posture*) akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi *stakeholder* saja. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan

maupun laporan tahunan. Dalam pandangan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki *stakeholder* bukan hanya memiliki *shareholder* saja.

Berdasarkan teori *stakeholder*, Guthrine *et al*, 2004 dalam Erwansyah, 2009 menyatakan bahwa manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan *stakeholder* dan melaporkannya kepada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa para *stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui semua informasi baik informasi *mandatory* maupun *voluntary*, informasi keuangan dan non keuangan. Dampak aktivitas perusahaan kepada *stakeholder* dapat diketahui melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa informasi keuangan dan non keuangan (sosial).

Stakeholder akan mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Penganut *active posture* akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial sesuai dengan permintaan *stakeholder* inti (*stakeholder* yang paling mempengaruhi perusahaan). Penganut *passive posture* akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial secara adil untuk semua *stakeholder*. Sehingga mungkin akan ditemui adanya beda fokus dalam pelaksanaan dari masing-masing perusahaan sesuai pandangan masing-masing perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat, operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinya pun dapat terancam bila

perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melalui top manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik yang relevan atau *stakeholder*-nya (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Guthrie dan Ward, 2006)

Keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai masyarakat ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan. Tidak jarang akan terjadi perbedaan potensial antara organisasi dan nilai-nilai sosial yang dapat mengancam legitimasi perusahaan yang sering disebut *legitimacy gap*. Bahkan menurut Lindblom (1994) dalam Guthrie dan Ward (2006) menyatakan bahwa ketika *legitimacy gap* terjadi dapat menghancurkan legitimasi organisasi yang berujung pada berakhirnya eksistensi perusahaan.

Suchman (1995) dalam Barkemeyer (2007) dalam Djakman dan Machmud (2008) memberikan definisi mengenai *organisational legitimacy* sebagai berikut:

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka legitimasi merupakan asumsi umum dari tindakan perusahaan yang diinginkan dan sesuai dengan sistem nilai yang dibangun berdasarkan norma, nilai, kepercayaan dan definisi.

Teori legitimasi merupakan turunan dari konsep *organizational legitimacy*, yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Guthrie dan Ward (2006) sebagai

“... a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy.”

Ini berarti bahwa keberadaan perusahaan dalam masyarakat akan tetap berlanjut jika tindakan perusahaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Jika terdapat *gap* antara tindakan perusahaan dan nilai-nilai masyarakat, maka akan muncul masalah legitimasi.

Menurut Guthrine dan Parker (1989) dan O’Dwyer (2002) dalam Ghazali (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan *social reporting behavior* di semua negara. Gray *et al* (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kinerjanya berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah.

2.1.3 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders* (Nurlela dan Islahudin,2008).

2.1.4 Pengungkapan Sosial sebagai Tanggung Jawab Perusahaan

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan didalam laporan baik dalam *annual report* maupun *sustainability reporting*. Berdasarkan UU No.40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007, pengungkapan pertanggungjawaban sosial wajib dimuat dalam *annual report*. Sedangkan *sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* harus menjadi dokumen strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya (Nurlela dan Islahudin,2008).

Gray *et al* (1995) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyebutkan tiga studi yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh emiten tersebut, yaitu:

1. *Decision Usefulness*

Pendekatan yang menjelaskan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan (PLS) dari manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

2. *Economic Based Theory (Positive Accounting Theory)*

Pendekatan yang didasarkan pada *positive accounting theory* (PAT) yang menganut paham yang mengutamakan maksimasi kemakmuran dan kepentingan pribadi individu. Atas dasar pandangan ini pertanggungjawaban utama perusahaan adalah menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki dan menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan meningkatkan laba (Friedman, 1962 dalam Chariri dan Ghazali, 2007).

Jika dikaitkan dengan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan, hipotesis *cost* politik (*political cost hypotheses*) dalam PAT sering digunakan sebagai media untuk membenarkan praktik PLS tersebut. Atas dasar hipotesis tersebut, pengungkapan sukarela yang terdapat dalam laporan tahunan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi biaya politis yang harus ditanggung perusahaan dalam menjelaskan aktivitasnya.

3. *Political Economy Theory*

PET mempertimbangkan kerangka politik, sosial, dan institusional dimana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan. PET juga mengakui pemakaian PLS dalam *annual report* sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam mempengaruhi sikap *stakeholders* (Guthrie dan Parker, 1990 dalam Chariri dan Ghazali, 2007).

Pengungkapan sosial dalam tanggung jawab perusahaan sangat perlu dilakukan, karena bagaimanapun juga perusahaan memperoleh nilai tambah dari kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber-sumber sosial (*social resources*). Jika aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber-sumber sosial maka dapat timbul adanya biaya sosial (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedang apabila perusahaan meningkatkan mutu *social resources* maka akan menimbulkan *social benefit* (manfaat sosial).

2.1.5 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan

Menurut Chariri dan Ghozali (2007), pengungkapan (*disclosure*) berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Setiap unit/pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2004 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Selain itu, dalam UU No.40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007 telah dijelaskan bahwa perusahaan wajib memuat pelaporan tentang pertanggungjawaban social dan lingkungan. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sejak di keluarkannya UU No.40 pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut menjadi landasan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan *mandatory disclosure* untuk setiap perusahaan di Indonesia bukan lagi *voluntary disclosure*.

Metode untuk menilai pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan selama ini ada beberapa cara, karena sulitnya untuk menilai secara kuantitatif pertanggungjawaban sosial perusahaan. Namun, yang sering dipergunakan adalah metode konten analisis laporan tahunan perusahaan atau *check list* (Fauzi,2008). Dalam penelitian ini metode *check list* yang dipergunakan berdasarkan aturan dari *Global Reporting Initiative (GRI)*. Alasan penggunaan aturan dari GRI ini karena GRI merupakan sistem pelaporan yang komprehensif dari kinerja CSR serta kebanyakan perusahaan yang mengadopsi GRI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, sumber daya alam, dan energi karena lebih banyak berhubungan dengan alam (Tanimoto dan Kenji,2005). Hal

tersebut sesuai dengan sampel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek.

Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, dalam konten analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari :

1. Ekonomi

Tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi lainnya.

2. Lingkungan Hidup

Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

3. Ketenagakerjaan

Tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

4. Hak Asasi Manusia

Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.

5. Kemasyarakatan

Tema ini berisi delapan item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

6. Tanggung jawab atas Produk

Tema ini berisi sembilan item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

2.1.6 Struktur Kepemilikan dengan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme dalam *corporate governance* (Gunarsih,2003 dalam Novitasari,2009). Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan juga menjelaskan komitmen pemilik untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan (Wardhani,2006 dalam Novitasari,2009).

Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik perusahaan. Karena sudah banyak penelitian yang menguji karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial, maka dalam penelitian ini difokuskan hanya meneliti struktur kepemilikan perusahaan. Karena pengaruh tekanan global yang meminta transparansi dan akuntabilitas serta isu-isu global yang dihadapi perusahaan multinasional, para investor sekarang juga mempertimbangkan kinerja

keuangan dan kinerja sosial dalam keputusan investasinya. Dalam suatu perusahaan, ada dua jenis *shareholder* yaitu *affiliated shareholder* dan *non affiliated shareholder*. *Non affiliated shareholder* merupakan pemegang saham yang tidak terkait langsung dengan kegiatan perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh institusi dan individu. Sedangkan *affiliated shareholder* merupakan pemegang saham yang terkait langsung dengan aktivitas perusahaan, seperti manajer dan *blockholder*. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini merupakan kepemilikan institusional yang dilihat dari asal investor yaitu kepemilikan institusional domestik dan kepemilikan asing.

2.1.6.1 Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud,2008). Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan,1991 dalam Fauzi, Mahoney, dan Rahman,2007).

Coffey dan Fryxell (1991) menemukan bahwa tingkat pengungkapan *corporate social performance* yang tinggi akan menarik investor, khususnya investor institusional. Terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan daya tanggap terhadap isu sosial oleh perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah wanita yang termasuk dalam jajaran direktur. Sedangkan, tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan tanggung jawab sosial yang ditunjukkan oleh kegiatan sosial yang bersifat memberi bantuan.

Waddock dan Graves (1994) menemukan bahwa kepemilikan institusional yang ditunjukkan oleh jumlah institusi yang memiliki saham di suatu perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap *corporate social performance*. Sedangkan, kepemilikan institusional yang ditunjukkan oleh persentase saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *corporate social performance*.

Turban dan Greening (1997) menyatakan bahwa investor institusional melihat keuntungan jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam *corporate social performance*. *Corporate social performance* berpengaruh secara positif terhadap reputasi dan daya tarik perusahaan terhadap para pekerja dan pelamar kerja. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Spicer (1978), Mahoney dan Robert (2007) bahwa investor institusional mempertimbangkan *corporate social performance* yang rendah dari perusahaan merupakan investasi yang berisiko. Risiko itu berasal dari biaya sanksi akibat mengabaikan peraturan yang ada (*mandatory disclosure*).

Djakman dan Machmud (2008) menemukan bahwa kepemilikan institusi yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun, dan *asset management* di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail (menggunakan indikator GRI dalam laporan tahunan perusahaan).

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan *corporate social performance*. Penelitian ini dilakukan pada tahun yang sama, saat UU No.40 Tahun 2007 dikeluarkan sehingga ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum siap menerapkan aturan tersebut.

2.1.6.2 Struktur Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud,2008)

Menurut Hadi dan Sabeni (2002) bahwa perusahaan asing mendapat pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan perusahaan induk serta kemungkinan

permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

Seperti diketahui, negara-negara luar terutama Eropa dan *United State* merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air (Djakman dan Machmud, 2008). Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Simerly dan Li, 2001 dalam Fauzi, 2008).

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995; Barkemeyer, 2007; Djakman dan Machmud, 2008).

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Fauzi (2008) menemukan bukti empiris bahwa pencapaian dari aspek sosial antara perusahaan nasional dengan perusahaan multinasional adalah sama. Sedangkan dari aspek lingkungan, pencapaian perusahaan multinasional yang ada

di Indonesia lebih baik daripada perusahaan nasional. Tidak ada hubungan antara kinerja sosial dengan kinerja keuangan dalam perusahaan nasional. Sedangkan dalam perusahaan multinasional terdapat hubungan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan. Berarti perusahaan dengan kepemilikan asing akan cenderung mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang lebih besar karena mempunyai dana yang besar untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan.

Tanimoto dan Suzuki (2005) melihat luas adopsi GRI dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Marwata (2006) dalam Djakman dan Machmud (2008) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang secara statistis signifikan antara struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia.

Konsisten dengan hasil penelitian Marwata (2006), Djakman dan Machmud (2008) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan asing terhadap CSR *disclosure*. Kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia tidak menggambarkan tingginya indeks GRI sebagai ukuran pengungkapan CSR. Kemungkinan yang mendasari perusahaan dengan kepemilikan asing terutama Eropa dan Amerika ini memiliki pengungkapan yang relatif kecil karena jika kepemilikan mereka pada perusahaan di Indonesia dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka kemungkinan persentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang

memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan kepada publik dan lebih banyak perusahaan *unregulated company* sehingga pengungkapan CSR cenderung tidak menjadi fokus utama perusahaan dalam menyajikan laporan tahunan.

2.1.7 Variabel Kontrol

2.1.7.1 ROA (*Return on Asset*)

Menurut Sutrisno, 2001 dalam Wijayanti, 2009, ROA merupakan kinerja keuangan perusahaan yang menjelaskan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Konsep ROA merupakan kriteria penilaian yang sangat luas dan dapat dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasi perusahaan. Penilaian ROA dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana efektifitas penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan. Jadi, perusahaan yang memperoleh laba tinggi tidak selalu berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki *return on asset* yang tinggi pula.

ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total asset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Menurut Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007), tingkat ROA memiliki hubungan positif dengan pengungkapan *corporate social performance*. Jika ROA dari suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan memiliki dana yang cukup dialokasikan untuk kegiatan sosial dan lingkungan sehingga tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya akan tinggi pula.

2.1.7.2 *Firm Size*

Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Perusahaan besar merupakan perusahaan yang banyak disoroti oleh pasar maupun publik secara umum karena lebih mungkin mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah, termasuk luar negeri. Perusahaan besar lebih mungkin merekrut karyawan dengan keterampilan tinggi dalam skala besar dan cenderung memiliki asset dalam jumlah yang besar. Semakin besar sorotan kepada sebuah perusahaan, semakin besar pula biaya politisnya. Dengan demikian, semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah (Watt & Zimmerman, 1990; Scott, 1997; Astrotamma, 2009).

Suripto (1999) dalam Sabeni dan Hadi (2002), menyatakan bahwa perusahaan besar mungkin lebih memiliki pemikiran luas, *skill* karyawan yang tinggi, sumber informasi yang banyak dibandingkan perusahaan kecil. Berdasarkan argumen diatas dapat diharapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki esensi atau pengungkapan yang lebih luas. Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan *corporate social performance*. Sejalan dengan penelitian diatas, Djakman dan Machmud (2008) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Buzby (1975) dalam Astrotamma (2009) menduga bahwa pada umumnya perusahaan kecil punya keterbatasan dalam melakukan

penyampaian pengungkapan secara luas sebagai cermin keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2.1.7.3 Firm Industry (Type)

Profile telah diidentifikasi sebagai faktor potensial yang mempengaruhi praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Utomo (2000) mendefinisikan industri *high profile* sebagai industri yang memiliki *consumer visibility*, resiko politik yang tinggi, atau kompensasi yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan akan lebih memperhatikan pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat, karena hal ini akan meningkatkan citra perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat penjualan.

Pada penelitian ini industri yang dikategorikan sebagai *high profile* adalah industri di bidang migas, pertambangan, kertas, agrobisnis, dan telekomunikasi. Alasan pemilihan industri tersebut adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan *regulated company*. Adapun regulasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut antara lain Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001, Undang-Undang Pertambangan Umum No. 11 Tahun 1967, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 mengenai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan, Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat. Serta Peraturan yang berhubungan dengan Hak Pengelolaan Hutan.

Djakman dan Machmud (2008) menemukan hasil bahwa tipe perusahaan (*profile* perusahaan) berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam *annual report*-nya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hasan Fauzi, Lois Mahoney dan Azhar Abdul Rahman (2007) dan Novita Machmud dan Chaerul D Djakman (2008). Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian sebelumnya, masih menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, dapat dilihat dari variabel kontrolnya yang berupa ROA, *firm size* dan *firm industry*. Pada penelitian Djakman dan Machmud (2007), variabel kontrol yang digunakan adalah *size*, *type* dan kategori BUMN dan non BUMN. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan, tahun pengujian, alat statistik dan kondisi yang berbeda. Secara ringkas, penelitian yang telah dilakukan mengenai struktur kepemilikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti dan Judul Penelitian	CSR Measures	Hasil Penelitian
1991	Coffey B.S. Fryxell G.E. <i>Institutional Ownership of Stock and Dimensions of Corporate Social Performance: An Empirical Examination.</i>	a. Daya tanggap terhadap isu sosial diproksikan dengan jumlah wanita yang masuk dalam jajaran direktur. b. Tanggung jawab sosial diproksikan dengan kegiatan sosial yang bersifat member bantuan. c. Manajemen isu sosial diproksikan dengan kepatuhan terhadap <i>Sullivan principles</i> .	a. Terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan daya tanggap terhadap isu sosial oleh perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah wanita yang termasuk dalam jajaran direktur. b. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan tanggung jawab sosial yang ditunjukkan oleh kegiatan sosial yang bersifat memberi bantuan. c. Terdapat hubungan yang negatif antara Manajemen isu sosial dengan kepemilikan institusional.
1994	Graves, S.B. Waddock, S.A. <i>Institutional owners and corporate social performance</i>	KLD (Kinder, Linderbergh, Domini).	a. Kepemilikan institusional yang diproksikan oleh jumlah institusi yang memiliki saham di suatu perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap <i>corporate social performance</i> . b. Kepemilikan institusional yang diproksikan oleh persentase saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap <i>corporate social performance</i> .

2005	Kanji Tanimoto dan Kenji Suzuki <i>Corporate Social Responsibility In Japan: Analyzing The Participating Companies In Global Reporting Initiative</i>	GRI <i>Guidelines</i> .	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadopsian GRI oleh perusahaan publik di Jepang dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan, isu lingkungan, kepemilikan asing dan penjualan ke luar negeri. b. Kepemilikan terbesar oleh perusahaan domestik, partisipasi dari grup bisnis terbesar, dan rasio laba bersih terhadap penjualan tidak signifikan terhadap pengadopsian GRI oleh perusahaan publik di Jepang.
2002	Lois Mahoney Robert R <i>Corporate Social and Environmental Performance and Their Relation to Financial Performance and Institutional Ownership: Empirical Evidence From Canadian Firm</i>	KLD (Kinder, Linderbergh, Domini).	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja keuangan. b. Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional.
2007	Hasan Fauzi, Lois Mahoney, Azhar Abdul Rahman <i>Institutional Ownership and Corporate Social Performance: Empirical Evidence from Indonesian Companies</i>	JRI (Jantzi Research Inc.)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada pengungkapan <i>corporate social performance</i>. b. ROA, ROE, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>corporate social performance</i>. c. Tipe industri sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social performance</i>.
2008	Novita Machmud Dan	GRI (<i>Global Reporting Initiative</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR <i>disclosure</i> dalam

	Chaerul D Djakman <i>Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006</i>		laporan tahunannya. b. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap CSR <i>disclosure</i> dalam laporan tahunannya. c. Ukuran perusahaan, dan tipe industri sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap CSR <i>disclosure</i> dalam laporan tahunannya. d. BUMN dan Non BUMN sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap CSR <i>disclosure</i> dalam laporan tahunannya.
2008	Hasan Fauzi <i>Corporate Social and Environmental Performance: A Comparative Study of Indonesian Companies and Multinational Companies (MNCs) Operating in Indonesia</i>	CSEP (<i>Corporate Social and Environmental Performance</i>) oleh Gray, <i>et al</i> (1987), Perks (1993), dan Abu Baker (2000).	a. Pencapaian dari aspek sosial antara perusahaan nasional dengan perusahaan multinasional adalah sama. b. Sedangkan dari aspek lingkungan, pencapaian perusahaan multinasional lebih baik daripada perusahaan nasional. c. Tidak ada hubungan antara kinerja sosial dengan kinerja keuangan dalam perusahaan nasional. d. Sedangkan dalam perusahaan multinasional terdapat hubungan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan.

Sumber : Data Sekunder diolah, 2011.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Tanggung jawab sosial merupakan sebuah usaha perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan legitimasi dalam masyarakat. Legitimasi ini

selanjutnya akan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan sebagai dampak operasinya terhadap masyarakat (*Legimacy Theory*). Sejalan dengan hal tersebut, tanggung jawab sosial merupakan usaha perusahaan atau organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholdernya*. Dalam pelaksanaannya, perusahaan akan memilah *stakeholder* yang dianggap penting dan keinginan *stakeholder* tersebut akan diutamakan (*Stakeholder Theory*).

Stakeholder yang dianggap penting oleh perusahaan salah satunya adalah pemegang saham (*shareholder*). Dalam suatu perusahaan, ada dua jenis *shareholder* yaitu *affiliated shareholder* dan *non affiliated shareholder*. *Non affiliated shareholder* merupakan pemegang saham yang tidak terkait langsung dengan kegiatan perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh institusi dan individu. Sedangkan *affiliated shareholder* merupakan pemegang saham yang terkait langsung dengan aktivitas perusahaan, seperti manager dan *blockholder*.

Kepemilikan saham oleh institusi merupakan kepemilikan saham yang cukup besar dalam suatu perusahaan. Sehingga, kepemilikan institusi ini dapat wewenang untuk mengontrol perusahaan. Terkait dengan isu *triple bottom line* yang telah mengglobalisasi, maka kepemilikan institusional cenderung mempertimbangkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam keputusan investasinya.

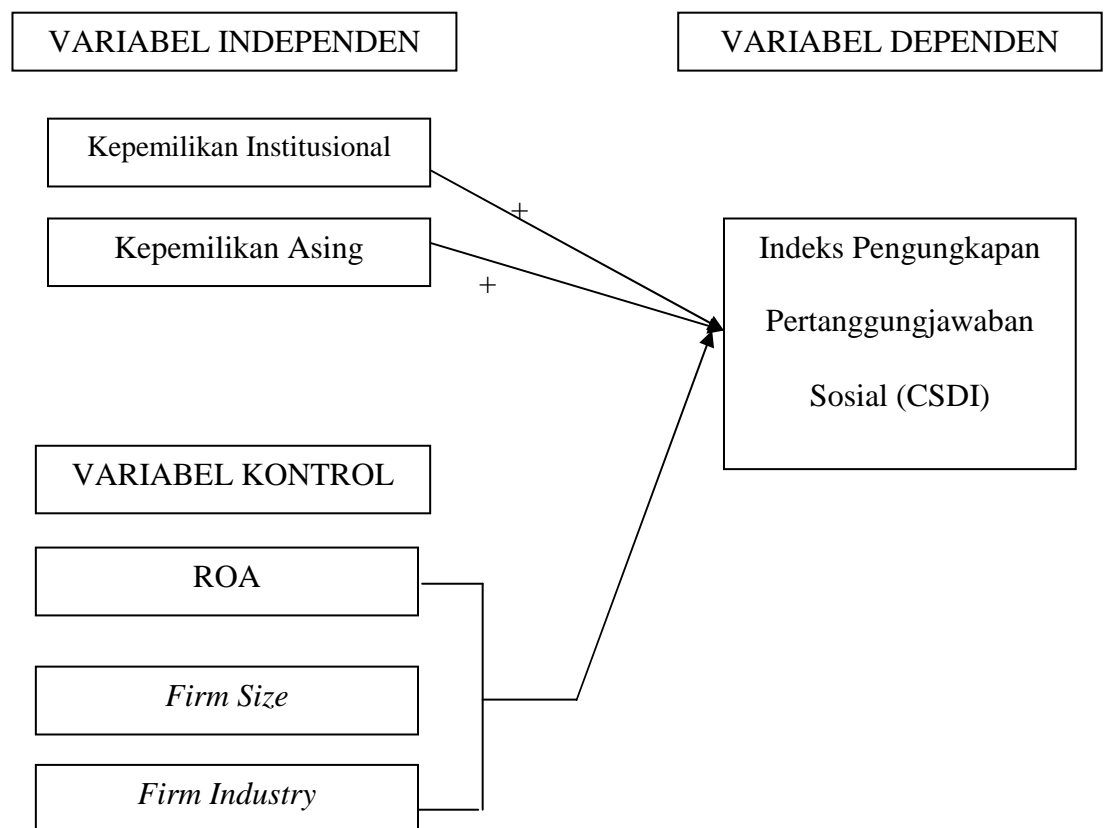
Terkait dengan isu *triple bottom line* dan banyaknya kasus perusahaan multinasional yang telah mengglobal, banyak perusahaan dengan kepemilikan asing (perusahaan multinasional) juga mempertimbangkan pengungkapan

pertanggungjawaban sosial. Hal ini terkait dengan legitimasinya terhadap masyarakat sekitar daerah operasinya dan keberlanjutan operasinya.

Berdasarkan telaah teori tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Hubungan Antar Variabel Penelitian



2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009 dalam

annual report adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, tipe industri, dan ROA.

Berdasarkan penelitian Coffey dan Fryxell (1991) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan daya tanggap terhadap isu sosial oleh perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah wanita yang termasuk dalam jajaran direktur. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan tanggung jawab sosial yang ditunjukkan oleh kegiatan sosial yang bersifat memberi bantuan. Serta terdapat hubungan yang negatif antara manajemen isu sosial dengan kepemilikan institusional.

Waddock dan Graves (1994) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap *Corporate Social Performance*. Kepemilikan institusional yang ditunjukkan oleh jumlah institusi yang memiliki saham di suatu perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap *corporate social performance*. Sedangkan kepemilikan institusional yang ditunjukkan oleh persentase saham yang dimiliki oleh institusi di suatu perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *corporate social performance*.

Lois Mahoney dan Robert Robin (2002) juga menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan di Kanada. Penelitian ini juga menemukan hubungan yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan saham institusional.

Berbeda dengan hasil penelitian Djakman dan Machmud (2008) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusi yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun, dan *asset management* di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail (menggunakan indikator GRI) dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) menemukan bukti empiris bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan *corporate social performance*. Penelitian ini dilakukan pada tahun yang sama, saat UU No.40 Tahun 2007 dikeluarkan sehingga ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum siap menerapkan aturan tersebut.

Namun, berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pemilik institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan. Banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan meningkat tiap tahun. Banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya program CSR sebagai salah satu bagian dari strategi perusahaan dan mendapatkan legitimasi oleh masyarakat (Permanasari, 2009). Berdasarkan penelitian Spicer (1978) dan Mahoney dan Robert (2007) bahwa investor

institusional mempertimbangkan *corporate social performance* yang rendah dari perusahaan merupakan investasi yang berisiko. Serta berdasarkan penelitian Turban dan Greening (1997) menyatakan bahwa investor institusional melihat keuntungan jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam *corporate social performance*. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report*.

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Terbukti dari penelitian Fauzi (2008) yang menyatakan bahwa dari aspek lingkungan, pencapaian perusahaan multinasional yang berada di Indonesia lebih baik daripada perusahaan nasional. Tidak ada hubungan antara kinerja sosial dengan kinerja keuangan dalam perusahaan nasional. Sedangkan dalam perusahaan multinasional terdapat hubungan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan. Berarti perusahaan dengan kepemilikan asing akan cenderung mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang lebih besar karena mempunyai dana yang besar untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan.

Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam melihat luas adopsi GRI dalam laporan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang

menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa Negara-Negara asing cenderung lebih perhatian terhadap aktivitas dan pengungkapan CSR serta perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*-nya dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995; Barkemeyer, 2007; Djakman dan Machmud, 2008). Maka hipotesa yang diajukan adalah :

H2: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validitas teori atau pengujian aplikasi kepada teori tertentu. Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi pembahasannya pada menguji apakah kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2009.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan pertanggungjawaban sosial (CSDI).

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen (X) terdiri dari kepemilikan institusional (X_1) dan kepemilikan asing (X_2).

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol terdiri dari ROA, *firm size*, dan *firm industry*.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

3.1.2.1 Variabel Dependen

1. Indeks Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial (CSDI)

Menggunakan *Content Analysis* untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan menggunakan indikator GRI meliputi *economic (9 item)*, *environment (30 item)*, *labor practices(14 item)*, *human rights (9 item)*, *society (8 item)*, dan *product responsibility (9 item)*. Adapun pengukurannya dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika terdapat pengungkapan sesuai dengan indikator GRI dan nilai 0 jika tidak terdapat pengungkapan atau pengungkapan tidak sesuai dengan indikator GRI.

Selanjutnya, skor dari setiap *item* dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut (Haniffa dkk (2005); Sayekti dan Wondabio (2007); Dahlia dan Siregar (2007)):

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Dimana:

CSDI : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j, $n_j = 79$ *item*

X_{ij} : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, $0 < CSDI_j < 1$

3.1.2.2 Variabel Independen

1. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership/ IO*)

Merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management* dan kepemilikan institusi lain) (Djakman dan Machmud,2008). Kepemilikan institusi dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham institusi dengan kepemilikan lebih dari 5% yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008-2009 (Waddock dan Graves,1994). Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari satu pemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi.

$$IO = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total jumlah saham yang beredar}}$$

2. Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership/FO*)

Merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh kepemilikan asing dalam bentuk badan usaha asing. Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham asing dengan kepemilikan lebih dari 5% yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008-2009. Apabila suatu perusahaan terdapat lebih dari satu pemilikan asing yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan

saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan asing.

$$FO = \frac{\text{Saham yang dimiliki asing}}{\text{Total jumlah saham yang beredar}}$$

Total jumlah saham yang beredar

3.1.2.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang variabelnya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Jika tidak dikontrol variabel tersebut akan mempengaruhi gejala yang sedang dikaji (Sarwono,2006).

Menurut Waddock dan Graves (1997), Mahoney dan Robert (2007) dalam Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) yang menunjukkan bahwa perbedaan beberapa hasil penelitian dalam *corporate social performance* diakibatkan oleh kinerja keuangan, ukuran perusahaan (*firm size*), dan tipe industri (*firm industry*).

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel kontrol. Variabel ini merupakan variabel yang dikontrol oleh peneliti supaya tidak mempengaruhi gejala yang sedang dikaji (Sarwono,2006). Konsisten dengan penelitian Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007) maka dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan. Total asset sebagai proksi *firm size*, serta *high profile* dan *low profile* sebagai proksi *firm industry*. Adapun penjelasan dari variabel-variabel tersebut adalah:

1. *Return On Asset (ROA)*

Merupakan kinerja keuangan perusahaan yang menjelaskan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor (Sutrisno, 2001 dalam Wijayanti, 2009).

ROA menggunakan dua sisi laporan yaitu Laporan Laba Rugi dan Neraca dengan membandingkan margin keuntungan dengan total aset yang dimiliki. ROA mampu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih luas karena komparasi terhadap uang yang ditanamkan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

2. *Firm Size (Size)*

Merupakan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008-2009 merupakan proksi dari ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Skala yang digunakan adalah *log asset*.

3. *Firm Industry (Type)*

Pada penelitian ini industri yang dikategorikan sebagai *high profile* dan *low profile*. Profil merupakan pandangan masyarakat tentang karakteristik yang dimiliki perusahaan terkait dengan bidang usaha, risiko usaha, jumlah karyawan yang dimiliki, dan lingkungan perusahaan (Waryanti, 2009).

Merujuk pada Djakman dan Machmud (2007), penelitian ini akan memasukkan perusahaan yang bergerak dibidang industri migas, pertambangan, kertas, agrobisnis, dan telekomunikasi sebagai perusahaan *high profile*. Alasan pemilihan industri tersebut adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan *regulated company*. Adapun regulasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut antara lain Undang Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001, Undang Undang Pertambangan Umum No.11 Tahun 1967, Undang Undang no.23 Tahun 1997 mengenai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan, Undang Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat dan peraturan yang berhubungan dengan Hak Pengelolaan Hutan.

Pengukurannya menggunakan variabel dummy yaitu perusahaan yang dimasukkan dalam tipe *high profile* diberi angka 1 sedangkan perusahaan yang dimasukkan dalam *low profile* diberi angka 0.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
1.	Dependen: CSDI	Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan	Rasio	Jumlah item yang diungkapkan perusahaan: jumlah

		perusahaan menggunakan indikator GRI.		<p>yang diharapkan sebanyak 79 item.</p> $CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$ <p><i>CSDI: Corporate Social Responsibility Disclosure Index</i></p> <p>perusahaan j</p> <p>n_j : jumlah <i>item</i> untuk perusahaan j, $n_j = 79$ <i>item</i></p> <p>$X_{ij} : 1 =$ jika <i>item</i> i diungkapkan; $0 =$ jika <i>item</i> i tidak diungkapkan.</p> <p>Sehingga, $0 < CSDI_j < 1$</p>
1.	Independen: IO (X_1)	Kepemilikan institusi (>5%) dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham institusi yang	Rasio	<p>IO = <u>Saham yang dimiliki institusional</u></p> <p>Total jumlah saham yang beredar</p>

2.	FO (X ₂)	<p>dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008-2009 (Waddock dan Graves,1994).</p> <p>Kepemilikan asing (>5%) dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham asing yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun2008 - 2009.</p>	Rasio	<p>FO = <u>Saham yang dimiliki asing</u></p> <p>Total jumlah saham yang beredar</p>
3.	Kontrol : ROA	<p>Kinerja keuangan perusahaan yang menjelaskan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan</p>	Rasio	<p>ROA = <u>Laba Bersih</u></p> <p>Total asset</p>

4.	<i>Size</i>	<p>aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor (Sutrisno, 2001 dalam Wijayanti, 2009).</p> <p>Jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008 - 2009 merupakan proksi dari ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.</p>	Nominal	<p>Log Asset</p> <p>Variabel dummy yaitu perusahaan yang dimasukkan dalam tipe <i>high profile</i> diberi angka 1 sedangkan perusahaan yang dimasukkan dalam <i>low</i></p>
5.	<i>Type Industry</i>	<p>Pada penelitian ini industri migas, pertambangan, kertas, agrobisnis, dan telekomunikasi sebagai perusahaan <i>high profile</i>.</p>	Kategori	<p>perusahaan yang dimasukkan dalam tipe <i>high profile</i> diberi angka 1 sedangkan perusahaan yang dimasukkan dalam <i>low</i></p>

		Alasan pemilihan industri tersebut adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan <i>regulated company</i> .		<i>profile</i> diberi angka 0.
--	--	---	--	--------------------------------

Sumber : Diolah Peneliti, 2011

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan publik yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama 2008-2009 sejumlah 393 perusahaan pada tahun 2008 dan sejumlah 397 perusahaan pada tahun 2009. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang tercatat di BEI tahun 2008 dan 2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), diketahui bahwa perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008 dan 2009 berjumlah 591 perusahaan. Pada akhir tahun 2008 perusahaan yang *listing* di BEI adalah 292 perusahaan non keuangan dan pada tahun 2009 sebanyak 299 perusahaan non keuangan.

Peneliti menggunakan periode dua tahun karena ingin mengetahui efek dari adanya UU No.40 tahun 2007 terhadap aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Karena pengungkapan pertanggungjawaban sosial sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2009.
2. Perusahaan bergerak pada bidang non keuangan.
3. Perusahaan tidak *delisting* selama periode 2008-2009.
4. Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2008-2009.
5. Perusahaan memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.
6. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dalam periode pengamatan karena pada tahun 2008 merupakan krisis ekonomi global yang sangat berpengaruh pada semua sektor.
7. Laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari eksternal yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa

laporan tahunan dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2009.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan. Sumber data dapat diperoleh dari www.idx.co.id, website perusahaan dan pojok BEI Undip.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 17.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Keempat asumsi klasik yang dianalisa dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dan analisis grafik histogram dan P-P plot. Dalam uji *one sample kolmogorov-smirnov test* variabel-variabel yang mempunyai *asympt. Sig (2-tailed)* di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2007).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolinearitas dapat dilihat

dengan menganalisis nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika:

1. Nilai Tolerance $< 0,10$, atau
2. Nilai VIF > 10 .

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2007).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji Scatter Plot. Dasar analisisnya adalah jika gambar menunjukkan titik-titik yang menandakan komponen-komponen variabel-variabel menyebar secara acak pada bidang scatter maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

2. Uji *Park*, uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah data yang akan diolah terjadi gangguan heteroskedastisitas atau tidak. Ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila hasil dari uji *Park* kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan data mengalami gangguan heteroskedastisitas dan sebaliknya (Ghozali, 2007).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2007).

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (*DW test*). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai *DW* terletak antara batas atas (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (d_l), maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih dari pada ($4-d_l$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) atau DW terletak antara ($4-d_u$) dan (d_l), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.5.3 Uji Hipotesis

Parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal. Sedangkan non parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan tidak normal. Salah satu jenis dari uji parametrik adalah uji regresi. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji pengaruh simultan (F test), dan uji parsial (t test).

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Regresi berganda digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan nominal (non-metrik) (Ghozali, 2007). Regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang diukur dengan kepemilikan institusional (X_1), dan kepemilikan asing (X_2) mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = CSDI

X₁ = Kepemilikan Institusional

X₂ = Kepemilikan Asing

X₃ = ROA

X₄ = *Size*

X₅ = *Type*

β = Koefisien regresi

e = error

Berikut ini merupakan beberapa persyaratan untuk menyatakan bahwa sebuah hipotesis dapat diterima:

1. Data distribusi secara normal.
2. Memenuhi uji satu sisi.
3. Model regresi harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar < 0.05 (Hipotesis diterima).
4. Nilai *Standardized coefficient beta* positif.
5. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan Uji T. Koefisien regresi signifikan jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$.
6. Tidak terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel independen.

7. Tidak terjadi autokorelasi

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2007). Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan model, maka penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya.

3.5.3.3 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Menurut Ghozali (2007), F test pada dasarnya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang hendak di uji adalah sebagai berikut:

Ho : suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Ha : suatu variabel bebas merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan F tabel dengan F hitung. Jika F hitung lebih besar dari tabel maka Ha diterima.
2. Menggunakan *signifikan level* 0,05 atau $\alpha=5\%$. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

3.5.3.4 Uji Parsial (t test)

Menurut Ghazali (2007), t test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis yang hendak di uji adalah sebagai berikut:

Ho : suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Ha : suatu variabel bebas merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan t tabel dengan t hitung. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima.
2. Menggunakan *signifikan level* 0,05 atau $\alpha=5\%$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.